PERATUTAN DESA BLAWIREJO NOMOR: 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022



DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BLAWIREJO NOMOR: 3 TAHUN 2022 T E N T A N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAWIREJO

Menimbang

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- bahwa bersasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
 Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
 Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan
 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 2730);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Priorittas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

- 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blawirejo tahun 2020 s/d 2025;
- 31. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo;
- Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2022 tentang Rancana Kerja
 Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023;
- Peraturan Desa Blawirejo No. 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO

Dan

KEPALA DESA BLAWIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

; PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.080.489.600,- berkurang sejumlah Rp. 115.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.965.489.600,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	2.080.489.600,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	115.000.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.965.489.600,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp	2.080.489.600,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	115.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.965.489.600,-
Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp	0,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan :		
1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan :		
1) Semula	Rp	25.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	0,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ini guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Blawirejo

Pada tanggal, 18 Oktober 2022

KEPALA DESA BLAWIREJO

ALI ROHMAN, S.R

Diundangkan di Blawirejo

Reada Tanggal, 18 Oktober 2022

Sekretaria Desa

AHMAD SUYOSO

Lembaran Desa Blawirejo Tahun 2022 Nomor 3

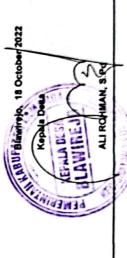
Tahun 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BLAWIREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

CODE REX	URALAN	ANGGA	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAHI	ni Contagnado	
		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	NET PONDON	
		3	10 A	9	•	_
7	PENDAPATAN		1000	ı -		
7	Pendapatan Asii Desa	72.600.000,00	72.600.000,00	00'0		
4	Pendapatan Transfer	2.007.889.600,00	1.892.889.600,00	(115.000.000,00)		
	JUNICH PENDAPATAN	2.080.489.600,00	1.965.489.600,00	(115.000.000,00)		
4	BELANJA			n i		
5.1.	Belanja Pegawai	316.311.536,00	288.816.896,00	(27.494.640,00)		
52	Belanja Barang dan Jasa	156.600.464,00	157.401.104,00	800.640,00		
5.3	Betanja Modal	1,107,555,400,00	1.019.249.400,00	(88.306.000,00)		
	Betanja Tidak Terduga	475.022.200,00	475.022.200,00	0,0		
	JUMILAH BELANJA	2.055.489.600,00	1.940.489.600,00	(115.000.000,00)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	00'0		
	PEMBLAYAAN			8		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	00'0		
622	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	000		
4	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	00'0		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	00'0	00'0	00'0	91	



16/10/2022 10 28:22 AM

		ZYYYGI	ANGGARAN (RP)	N (RP)	BERTAMBAH	SUMBERDANA
KODE REK	Ä	NAME OF THE PARTY	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
1	2		*	2	9	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	23.887.380,00	51.382.020,00	27.494.640,00	
1.1.0	52	Belanja Barang dan Jasa	23.887.380,00	24.688.020,00	800.640,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	00'0	26.694.000,00	26.694.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	00'0	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	00'0	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	3.500.000,00	3.500.000,00	00'0	
1.1.06	52	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	00'0	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	9.600.000,00	00'0	**************************************
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	00'0	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pu	51.000.000,00	51.000.000,00	00'0	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	00'0	
1.1.91		Pemberlan penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	00'0	00'0	00'0	
1.1.91	52	Belanja Barang dan Jasa	00'0	00'0	00'0	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	00'0	
1.1.93	52.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	000	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.2	52	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	00'0	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	00'0	
1.1.95	52	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	000	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	52	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	900	
1.1.97		Operational Linnas	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	88	
7		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.588.684.00	15,538,654,00	0.00	
1203		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D.	15.588.694,00	15.502.654,00	800	
1203	52.	Belanja Barang dan Jasa	15.588.684,00	15.588.684,00	888	
2			13.500.000.00	13,500,000,00	No.	

	1	MALAGE	ANGGARAN (RP)	NN (RP)	BERTAMBAH	SUMBEDOAKS.
	5		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
-	~		•	9	•	,
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
14.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R.	1.000.000,00	1.000.000,00	00'0	
14.01	52	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	00'0	
14.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lalnnya (Musdus, rembug desa Non R	3.000.000,00	3.000.000,00	00'0	
1400	52	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	00'0	
148		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	1.000.000,00	1.000.000,00	00'0	
148	52	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0.0	
148		Penyusunan Dekumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	2.500.000,00	2.500.000,00	000	
140	52	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	00'0	
14.80		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	00'0	
148	52.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	00'0	
~1		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,116,754,800,00	1.001,754.800.00	(115.000.000.00)	
17	<u> </u>	Sub Bidang Pendidikan	12.000.000.00	12.000.000.00	878	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TIX/TPA/TIXA/TPQ/Madrasah NonFormal Millik Desa (.	12.000.000,00	12.000.000,00	00'0	
21.01	52	Betanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	000	
77		Sub Bidang Kesehatan	32.199.400.00	32,199,400,00	870	
22.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	12.199.400,00	12.189.400,00	00'0	
2202	52	Belanja Barang dan Jasa	12.199.400,00	12.199.400,00	00'0	
2281		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	20.000.000,00	00'0	
2281	52	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	000	
2		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.072.555.400.00	957,555,400,00	(115,000,000,00)	
23.02		Pemeliharaan Jalan Ungkungan Pemukiman/Gang	00'0	150.000.000,00	150.000.000,00	
23.02	53	Betanja Modal	00'0	150.000.000.001	150 000 000 00	
23.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	87.555.400,00	87.555.400,00	0,00	
2303	53	Betarija Modal	87.555.400,00	87.555.400.00	00'0	
2.3.06	_	Pemeliharaan Presarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Seiokan/Parit/Drainas	475.000.000,00	218.000.000,00	(263.000.000,000,00)	

## NETLALDI (BERNURANG) Tembok penahan tanah (TPT)	の一を		NVV	ANGGARAN (RP)	N (RP)	BERTAMBAH	SUMBERDANA
2.3. Belantja Mocial 4 6 6 5.3. Pennikaja Mocial 770.000.000.00 270.000.000.00 (785.000.000.00 5.3. Pennikaja Mocial Pennikaja Mocial 240.000.000.00 270.000.000.00 5.3. Belanja Mocial 240.000.000.00 240.000.000.00 240.000.000.00 5.3. Belanja Mocial 15.600.000.00 240.000.000.00 240.000.000.00 5.2. Belanja Mocial 15.600.000.00 15.600.000.00 240.000.000.00 5.2. Belanja Berang dan Jasa 15.600.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanja Berang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 Pennishasan kepatan RAZS Belanja Berang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 Sub Bidang Pertanian dan Penemakan 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 Sub Bidang Pertanian dan Penemakan 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 Sub Bidang Peningkatan Kapatian Apartur Desa 600.000.00 15.000.000.00	KODE	REK		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
5.3. Behaltsja Modali 475.000.000.00 210.000.000.00 CR56.000.000 5.3. Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Tembok panahan tanah (TPT) 270.000.000.00 270.000.000.00 270.000.000.00 5.3. Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 240.000.000.00 270.000.000.00 270.000.000.00 5.3. Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 240.000.000.00 270.000.000.00 270.000.000.00 5.2. Bibang Akdula Sarana Kahasilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 15.600.000.00 270.000.000.00 15.600.000.00 5.2. Behanja Barang Atah Jasa Again Kabulakha Kahasilitasi/Peningkatan Atain Kasanian, Adair/Kabulakhan, Adair/Kabula	-	2	6	•	ະດ	9	1 -415
5.3. Phenibangunan/Rohabilitasi/Peningkatan Tambok panahan tanah (TPT) 270 000 000 00 271 000 000 00 5.3. Belanja Modal 2000 000 00 270 000 000 00 270 000 000 00 5.3. Belanja Barang debuladan Kebabilitasi/Peningkatan Subanahan tanah (TPT) 210 000 000 00 240 000 000 00 5.2. Belanja Barang debuladan Kebabilitasi/Peningkatan dan Kesgamaan (HUT) 15.800 000 00 15.600 000 00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 600 000 00 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 600 000 00 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 600 000 00 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 500 000 00 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. Belanja Barang dan Jasa Pennihalan Kepitan Albanahan Masinahan 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. Belanja Barang dan Jasa Pennihalan Kepitan Albanahan Aparahan dan Peternahan 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. Belanja Barang dan Jasa Pennihalan Modal 15.000 000 00 15.000 000 00 5.3. </td <td>23.05</td> <td>5.3</td> <td>Belanja Modal</td> <td>475.000.000,00</td> <td>210.000.000,00</td> <td>(265.000.000,00)</td> <td></td>	23.05	5.3	Belanja Modal	475.000.000,00	210.000.000,00	(265.000.000,00)	
5.3. Belaninja Moctal 270.000.000.00 5.3. Pennihargunan/Rehabilitasu/Peningtatan Sarana Prasarana Olehraga 270.000.000.00 270.000.000.00 5.3. Belanija Moctal Sarah Birday KelakSYARAKATAN 15.600.000.00 240.000.000.00 5.2. Bildawija Moctal Sarah Birday Robentaryaan dan Kesapanaan 15.600.000.00 240.000.000.00 5.2. Belanija Barrang dan Jasa 15.000.000.00 15.600.000.00 15.600.000.00 5.2. Belanija Barrang dan Jasa 600.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanija Barrang dan Jasa 600.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanija Barrang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanija Barrang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanija Barrang dan Jasa Aparaturahan dan Peternakan 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanija Barrang dan Jasa Aparaturahan dan Peternakan 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanija Barrang dan Jasa Aparaturahan dan Peterna	23.90		Pembengunan/Rehabilitas//Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	270.000.000,00	270.000.000,00	00'0	
5.3. Behavis Modal 240,000,000,00 240,000,000 5.3. Behavis Modal 240,000,000,00 240,000,000,00 5.4. BildAND PERMBINAAN KEMASYARAKATAN 15,600,000,00 240,000,000,00 5.2. Baldang Kebudayaan dan Keagamaan 15,600,000,00 15,600,000,00 5.2. Penning Barang dan Jasa 600,000,00 15,000,000,00 5.2. Behanja Barang dan Jasa 600,000,00 600,000,00 5.2. Behanja Barang dan Jasa 600,000,00 600,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 15,000,000,00 600,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 20,000,000,00 15,000,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 20,000,000,00 15,000,000,00 5.3. Behanja Barang dan Jasa 20,000,000,00 15,000,000,00 5.3. Be	23.90	5.3	Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	00'0	
S.3. Belaniya Modal 240,000,000,00 240,000,000,00 BLOANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 15,800,000,00 15,800,000,00 S.2. Belanja Barang Kabudayaan dan Kagamaan (HUT) 15,800,000,00 15,800,000,00 S.2. Belanja Barang dan Jasa FORDARA MASYARAKAT 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Modal Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Modal Jasa 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Barang dan Jasa Apartari dan Pelemakan 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Modal Samangulanan kauangan dasa Apartari Dasa 20,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Barang dan Jasa Apartari Dasa 20,000,000,00 15,000,000,00 15,000,000,00 S.2. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Apartari Dasa Mendal	23.92		Pembangunan/Rehabilitas//Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	240.000.000,00	240.000.000,00	00'0	
Sub-Bildang PerbilihukAN KENMASYARAKATAN 15.600.000.00 15.600.000.00 5.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 15.000.000,00 5.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 15.000.000,00 5.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 15.000.000,00 BIDANG PENBERDAYAAN MASYARAKAI 56.000.000,00 15.000.000,00 S.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 S.3 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 S.2 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 S.3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 S.4 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 S.5 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 S.4 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 S.4 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 S.4 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.00	_	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	240.000.000,00	00'0	
5.2 Belanria Barang dan Jasa 15.600.000.00 15.600.000.00 5.2 Belanria Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2 Belanria Barang dan Jasa 600.000.00 15.000.000.00 5.2 Belanria Barang dan Jasa 600.000.00 600.000.00 5.2 Belanria Barang dan Jasa 50.000.000.00 600.000.00 5.3 Belanria Barang dan Jasa 50.000.000.00 50.000.000.00 5.3 Belanria Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2 Belanria Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3 Belanria Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2 Belanria Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3 Belanria Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.4 Belanria Barang dan Jasa 50.000.000.00 15.000.000.00 5.5 Belanria Barang dan Jasa 50.000.000.00 15.000.000.00 5.4 Belanria Barang dan Jasa 50.000.000.00 6.000.000.00 5.4 <td< td=""><td>해</td><td></td><td>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</td><td>15.600.000,00</td><td>15.600.000,00</td><td>000</td><td></td></td<>	해		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.600.000,00	15.600.000,00	000	
5.2 Belania Barang dan Jasa Fennyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 15,000.000,00 15,000.000,00 15,000.000,00 5.2 Belania Barang dan Jasa 600.000,00 15,000.000,00 600.000,00 5.2 Belania Barang dan Jasa 56,000.000,00 56,000.000,00 600.000,00 5.3 Belanja Barang dan Jasa 15,000.000,00 15,000.000,00 15,000.000,00 5.3 Belanja Barang dan Jasa 15,000.000,00 15,000.000,00 15,000.000,00 5.2 Belanja Barang dan Jasa 15,000.000,00 15,000.000,00 15,000.000,00 5.3 Belanja Barang dan Jasa 15,000.000,00 15,000.000,00 15,000.000,00 5.2 Belanja Barang dan Jasa 15,000.000,00 15,000.000,00 15,000.000,00 5.4 Belanja Barang dan Jasa <td>22</td> <td></td> <td>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</td> <td>15.600.000,00</td> <td>15.600.000.00</td> <td>000</td> <td></td>	22		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.600.000,00	15.600.000.00	000	
5.2 Belaning Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2 Permbinaan kegiatan BAZIS 600.000,00 600.000,00 5.2 Belaning Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 5.2 BEIDANG PERMBERDAYAAN MASYARAKAT 56.000.000,00 260.000,00 5.3 Belaning Pertanian dan Peremakan 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanip Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanip Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanip Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanip Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanip Barang dan Jasa 4000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanip Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.4. Belanip Barang dan Jasa 5.000.000,00 15.000.000,00 5.5. Belanip Barang dan Jasa 5.000.000,00 178.022.200,00 5.4. Belanip Totak Terdupa 779.022.200,00 178.022.200,00 5.4. Belanip Totak Terdupa <	3203		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	15.000.000,00	15.000.000,00	00'0	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 5.3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKT 56.000.000,00 56.000.000,00 5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanja Modal 35.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Modal 35.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Modal 20.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Modal 20.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 20.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 20.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 475.022.200,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 475.022.200,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 475.022.200,00 779.022.200,00 5.4. Belanja Tidak Tarduga 779.022.200,	3203	52	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	00'0	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 56.000.000.00 26.000.000.00 26.000.000.00 5.3. Belanja Modal 15.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanja Modal 20.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000.00 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 20.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 20.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 6.000.000.00 6.000.000.00 5.4. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 719.022.200.00 719.022.200.00 5.4. Belanja Barang dan Jasa 79.022.200.00 719.022.200.00 719.022.200.00 5.4. Belanja Barang Bencana 79.022.200.00 719.022.200.00 719.022.200.00	3294		Pembinaan kegiatan BAZIS	00'000'009	600.000,00	00'0	
5.3. Bellang Pertantan dan Peternakan 56.000.000.00 56.000.000.00 5.3. Bellang Pertantan dan Peternakan 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Modal 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Modal 33.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Modal 20.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Modal 20.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 20.000.000.00 5.4. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 6.000.000.00 5.4. Belanja Barang dan Jasa 779.022.200.00 79.022.200.00 5.4. Belanja Karug Pennanggulanan Bencana 79.022.200.00 79.022.200.00 5.4. Belanja Karug Pennanggulanan Bencana 79.022.200.00 79.022.200.00 5.4. Belanja Kardan Darurat 79.022.200.00 79.022.200.00		5.2	Belanja Barang dan Jasa	00'000'009	00'000'009	00'0	
5.3. Belanja Berang dan Jasa 50.000.000.00 50.000.000.00 5.3. Belanja Modal 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Modal 15.000.000.00 15.000.000.00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Modal 20.000.000.00 15.000.000.00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000.00 20.000.000.00 5.3. Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000.00 20.000.000.00 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000.00 20.000.000.00 BiDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 4175.022.200.00 6.000.000.00 Sub Bidang Penanggulanan Bencana 79.022.200.00 79.022.200.00 Penanggulanan Bencana 79.022.200.00 79.022.200.00 Sub Bidang Keadaan Darurat 79.022.200.00 79.022.200.00 Sub Bidang Keadaan Darurat 79.022.200.00 79.022.200.00	√i		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.000.000.00	56.000.000,00	00'0	
5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 5.3. Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000,00 20.000.000,00 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan pengelolaan keuangan desa 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 Penanggulanan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darunat 79.022.200,00 79.022.200,00 S.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000.00	50.000.000.00	000	
5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 5.3. Belanja Berang dan Jasa 6.000.000,00 20.000.000,00 5.2. Belanja Penlngkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Berang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 BUDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 475.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 Penanggulangan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Kaadaan Darurat 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Kaadaan Darurat 396.000,000,00 396.000,000,00	4204		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersien/Sederhana	15.000.000,00	15.000.000,00	00'0	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.3. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Peningkatan pengelolaan keuangan desa 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 475.022.200,00 Sub Bidang Penanggulanan Bencana 79.022.200,00 Penanggulanan Bencana 79.022.200,00 Pelanja Tidak Terduga 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 1396.000.000.00	-	5.3.	Betanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	00'0	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 5.3. Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 475.022.200,00 6.000.000,00 Sub Bidang Penanggulanan Bencana 78.022.200,00 78.022.200,00 Penanggulanan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 S.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000	4.2.99			35.000.000,00	35.000.000,00	00'0	
5.3. Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 475.022.200,00 6.000.000,00 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darunt 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darunt 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darunt 396.000.000,00 396.000.000,00		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	00'0	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 475.022.200.00 79.022.200.00 Penanggulanan Bencana 79.022.200.00 79.022.200,00 5.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000,00		5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	00'0	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 475.022.200,00 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 475.022.200,00 475.022.200,00 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 79.022.200,00 79.022.200,00 FA. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000,00	2		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000.00	6.000.000,00	000	
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 475.022.200.00 475.022.200.00 Sub Bidang Penanggulanan Bencana 79.022.200.00 79.022.200.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000,00	4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	6.000.000,00	00'0	
Bild Ang PenAnd GULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 475.022.200.00 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 79.022.200.00 For amnggulanan Bencana 79.022.200,00 For amnggulanan Bencana 79.022.200,00 S.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	00'0	
Sub Bidang Keadaan Darurat 79.022.200,00 79.022.200,00 5.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 5.4. Bub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000,00	ᆆ		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	475.022.200,00	475.022.200.00	000	
5.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 5.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000,00	2.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	79.022.200,00	79.022.200,00	000	
5.4. Belanja Tidak Terduga 79.022.200,00 79.022.200,00 Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000,00 396.000.000,00	9.1.00		Penanggulanan Bencana	79.022.200,00	79.022.200,00	00'0	
Sub Bidang Keadaan Darurat 396.000.000.00 396.000.000.00 396.000.000.00	5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.022.200,00	79.022.200,00	00'0	
	6.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	396.000.000.00	396.000.000.00	000	

5	ì	N W W	ANGGAF	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAHI	SIMBERDANA
	OUE KEN		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
	2		4	ro.	6	7
8		Penanganan Keadaan Darurat	396.000.000,00	396.000.000,00	00'0	
2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	396.000.000,00	00'0	
		JUMLAH BELANJA	2.055.489.600,00	1.940.489.600,00	(115.000.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	00'0	
	e d	PEMBLAYAAN				
	2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	00'0	
	622	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	00'0	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	00'0	0,00	00'0	
				237		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING NOMOR: 188/ 3 /413.306.02.1/2022

TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ATAS

RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO.

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

 Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Priorittas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blawirejo tahun 2020 s/d 2025;
- Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo;
- Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2022 tentang Rancana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023;
- 33. Peraturan Desa Blawirejo No. 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022.

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo membahas Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blawirejo

Pada tanggal, 18 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027 / 3 /413.306.02.1 / 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blawirejo perihal Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo menyatakan *Menyepakati bersama* rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo

1. Drs. H. SUKAJI, MAK

2. MAT NGALI, MASekretaris

3. <u>H. ABU HAMID</u> Anggota

4. M. SYAHID, M,Ag Anggota

5. M. ALI MAHFUDZ Anggota

6. NUR QOMARI, S,Pd Anggota

7. TARSIH Anggota